

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka membantu untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian ini, peneliti menyajikan penelitian terdahulu sebagai suatu perbandingan antar penelitian yang dilakukan peneliti dan juga teori-teori serta hasil yang relevan yang diuraikan secara singkat. Dengan penelitian yang peneliti sajikan yaitu Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur sebagai kajian yang peneliti lakukan dalam mengatasi permasalahan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur terhadap masyarakatnya yang mengalami dampak dari pandemi ini. Maka dari itu peneliti perlu melakukan perbandingan dengan kajian penelitian lain agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan penelitian yang dibandingkan satu sama lain, serta untuk mengetahui tambahan referensi-referensi penelitian yang terkait dengan kajian yang peneliti lakukan.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai penguat dalam penelitian ini, peneliti mencari referensi – referensi dengan substansi yang sama dan terkait dan berhubungan dengan penyajian penelitian terdahulu lainnya sebagai perbandingan terhadap penelitian yang lain untuk diurai sehingga muncul sebuah hasil dari perbandingan yang dilakukan untuk diurai sehingga memunculkan sebuah hasil dari perbandingan yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan teknik penelitian yang

digunakan penjelasannya sebagai berikut :

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Andryanto Putra dengan judul Strategi Penanggulangan Pandemi Dalam Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-2019 Kabupaten Belitung Timur (2020), penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pembahasan mengenai judul penelitian ini adalah pada kasus penanganan *Covid-19* di kabupaten Belitung Timur, munculnya *Covid-19* ini banyak masyarakat yang masih memerlukan bantuan. Melihat dari kajian penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan kajian yang peneliti lakukan, adanya kesamaan tersebut dilihat dari pembahasan yang sama-sama membahas terkait penanggulangan pandemi dalam upaya percepatan penanganan *Covid-19*. Perbedaan dari penelitian tersebut adanya variabel yang berbeda dengan kajian yang peneliti lakukan, variabel tersebut menggunakan strategi dalam melakukan penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan variabel implementasi beserta peran yang dilakukan oleh BPBD. Pada kajian yang peneliti lakukan BPBD memiliki perananan penting dalam penanganan *Covid-19* pada kasus kematian akibat pandemi, pelayanan kesehatan serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena pandemi.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Mariama Qamariah, Afifuddin , Suyeno (2020) dengan judul Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar di Kota Batu, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pembahasan mengenai judul penelitian ini bagaimana suatu Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan Lansia terlantar Kota Batu masih memiliki keterbatasan sumber daya dan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak Lansia yang

belum mendapatkan bantuan. Teknik analisis ini menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kelebihan penelitian tersebut adanya pembahasan yang tidak biasa, yaitu pada judul penelitian Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlanjar di Kota Batu, judul tersebut mengacu dan terfokuskan pada permasalahan lansia yang terlanjar dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini, lalu juga seperti peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga hal tersebut menjadi suatu kelebihan pada kajian penelitian terdahulu ini. Namun kekurangan pada penelitian tersebut jika dibandingkan dengan kajian yang dilakukan peneliti dengan judul Lansia Terlanjar tersebut memiliki kecenderungan variabel yang terkesan biasa, yaitu variabel implementasi, yang mana variabel tersebut sudah banyak ditemukan di kajian penelitian yang peneliti telusuri, sehingga pembahasan hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan lansia yang mana sama halnya dilakukan pelaksanaan bantuan sosial seperti biasanya kepada warga yang tidak mampu, namun bedanya disini hanya kepada siapa orangnya saja.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni'matus Zakiyah dan Muhammad Afthon Ilman Huda (2020) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* Di Desa Gendongarum Kecamatan Kantor kabupaten Bojonegoro, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pembahasan mengenai judul penelitian ini mengalami permasalahan program BST dan BLT Dana Desa di Desa Gendongarum Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro masih kurang efektif dan masih banyak masyarakat yang sangat

membutuhkan tidak mendapatkan BST dan BLT karena data yang diinput masih banyak yang tidak tetap sasaran. Teknik analisis ini menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jika dilihat dari pembahasannya dengan dibandingkan dengan kajian yang peneliti lakukan persamaannya ialah sama-sama membahas terkait bantuan sosial yang meliputi sembako, BLT dan BST. Perbedaannya yaitu adanya hasil di akhir yang menyebutkan sampai manakah efektivitas penyaluran bantuan sosial pada penelitian tersebut, sedangkan pada hasil penelitian yang dikaji peneliti adanya masalah kolaborasi antar pemerintah yang tidak optimal, sehingga sama-sama belum efektif.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Mukoddimah (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan *Covid-19* di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, Teknik analisis ini menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Perbandingan antara penelitian tersebut dengan kajian yang peneliti lakukan ialah adanya persamaan pada judul dan pembahasan terkait penyaluran pelaksanaan bantuan sosial, namun pada lokasinya penelitian tersebut mengambil skala lokus tingkat kecamatan, jika peneliti mengkaji penelitian dengan fokus dan lokus Belitung Timur, ditambah adanya peran BPBD yang menjadi fokus dan lokus peneliti dalam melakukan observasi ke lapangan.

Tabel 2.1.
Kajian Penelitian Terlebih Dahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Andryanto Putra (2020)	Strategi Penanggulangan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Belitung Timur	Thomas dan Elaine B (2014)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kasus
2	Mariama Qamariah, Afifuddin, Suyeno (2020)	Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantardi Kota Batu	Widodo (2018:85)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
3.	Fatkul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni'Matus Zakiyah dan Muhammad Afthon ImanHud (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Sondang P. Siagian (2016)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
4.	Mukoddimah (2021)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin	Efektivitas (2016)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Dari ke empat penelitian tersebut keseluruhannya berkenaan dengan permasalahan penanggulangan penanganan *Covid-19*. Beberapa penanggulangan tersebut meliputi program-program bantuan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, masyarakat tidak mampu, hingga lansia terlantar. Beberapa kelebihan yang peneliti lihat dari ke empat penelitian tersebut jika memunculkan suatu inovasi yang tidak biasa, yaitu pada judul penelitian Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlanjar di Kota Batu, judul tersebut mengacu dan terfokuskan pada permasalahan lansia yang terlantar dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini, lalu juga seperti peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga hal tersebut menjadi suatu kelebihan pada kajian penelitian terdahulu ini.

2.1.2. Konsep Administrasi

Administrasi dikembangkan oleh pola pemikiran yang dijadikan pedoman melakukan suatu kegiatan manusia yang sengaja dilakukan agar tidak terjadi kegagalan dalam melaksanakan suatu tindakan yang sudah direncanakan. Pengertian administrasi adalah kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Administrasi merupakan proses yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, baik tujuan bersama, maupun pribadi (kelompok atau individu). Jika secara luas administrasi berkaitan dengan catat mencatat, buku pembukuan, tulis menulis, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan menginput atau output data terkait pencatatan dalam suatu organisasi atau perusahaan atau juga instansi yang mana semua wadah tersebut pasti memerlukan administrasi.

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan) dan administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *ad* (insentif) dan *ministrare* diartikan sebagai melayani membantu serta memenuhi. Administrasi juga merupakan kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Administrasi secara umum diartikan sebagai suatu proses kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan. Secara formal dalam suatu organisasi maka proses kerjasama adalah upaya mewujudkan tujuan organisasi, administrasi memiliki dua arti secara sempit yaitu :

Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses Kerjasama yang dilakukan oleh antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya dan berhasil. Perkembangan administrasi berlangsung secara terus-menerus keinginan manusia sebagai ilmu administrasi maupun secara profesional.

Pengertian Administrasi dalam arti luas menurut **Urbert Sillalahi** dalam teori bukunya **“Teori Administrasi Publik”(2016:7)** yaitu : “Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan”

Sedangkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik yang bersifat ketatausahaan. Jadi tata usaha merupakan suatu bagian kecil dalam administrasi yang harus dipelajari dalam manajemen.

Pengertian administrasi yang juga berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah beragam. Sebagai calon administrator dan ilmuwan administrasi, maka dari itu kita wajib tahu bahwa administrasi adalah sebagai ilmu dan cabang-cabang yang berkembang di suatu wilayah yang disinggahi oleh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Administrasi memiliki dua lingkup pemaknaan, yakni administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas.

Sedangkan Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan, sedangkan administrasi dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan”.

Pengertian Administrasi dalam arti sempit menurut **Silalahi** dalam bukunya yang berjudul “**Studi tentang Ilmu Administrasi**”(2016:5) sebagai berikut “Merupakan penyusunan dan perencanaan data dan informasi secara systemis dengan maksud menyediakan keterangan serta mempermudah keseluruhan didalam hubungannya satu sama lain”

Menurut **Siagian** yang dikutip **Pasolong** dalam “**Teori Administrasi Publik**” (2017:3) yaitu “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, pejuang-pejuang ilmu yang berusaha menegaskan jati diri administrasi sebagai ilmu terus melakukan dengan upaya inovatif seiring paradigma yang berkembang. Di Indonesia, beberapa ahli sejak awal telah mengklasifikasikan cabang ilmu administrasi.

Dari kutipan dalam buku **Sondang P. Siagian (1971; 19)** membagi ilmu administrasi menjadi tiga cabang, yakni :

- a. Administrasi negara (*public administration*)
- b. Administrasi privat (*private administration*).
- c. *Public business administration* atau *public business corporation*.

Berhubung kegiatan administrasi privat sebagian besar dilakukan oleh sektor niaga, maka cabang ilmu ini disebut administrasi bisnis (*business administration*). Ketiganya memiliki keterkaitan yang erat, serta keterhubungan dari aspek-aspek pada nilai-nilai administrasi yang seperti dijelaskan sebelumnya dalam dasar-dasar administrasi.

Menurut **White** yang dikutip **Maksudi** dalam “**Dasar-dasar Administrasi Publik**” (2017:27) yaitu “Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil”

Selain itu, berikut juga definisi administrasi Menurut **The Liang Gie (1980:9)** Dalam Bukunya yang menerjemahkan Administrasi sebagai berikut :

“Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Lanjutan dari teori tersebut, menurut **The Liang Gie (1979)**, sebagai sebuah ilmu administrasi memiliki cabang-cabang yang meliputi :

- 1) Administrasi negara/ *state*
- 2) Administrasi perusahaan/ *bisnis*
- 3) Administrasi kemasyarakatan/ *social*

Administrasi mengandung tiga muatan, yaitu : pertama administrasi sebagai seni adalah sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja, sedang akhirnya tidak ada. Kedua administrasi mengandung unsur-unsur tertentu yakni adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas (termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi dan unsur lainnya). Ketiga, administrasi sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada.

Dari beberapa pengertian administrasi dalam arti luas tadi dapat disimpulkan pada dasarnya semua kegiatan yang mengandung unsur-unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama, serta adanya keinginan individual maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya merupakan proses yang harus dilalui, yaitu administrasi sebagai bentuk proses yang harus dilalui oleh semuanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, karena dalam melaksanakan administrasi saling bergantung satu sama lain tidak bisa sendiri dan administrasi sudah memiliki tugas yang telah terstruktur dengan baik untuk mencapai tujuannya., dan teori administrasi berkaitan langsung dengan struktur hubungan, legitimasi kekuasaan, tujuan yang telah disepakati, dan faktor-faktor lainnya dalam melakukan kerjasama.

2.1.3. Administrasi Publik

Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Serta berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan pada publik yang meliputi beberapa aspek, yaitu kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara. Administrasi merupakan sebuah kemutlakan dan kewajiban suatu perangkat pengaturan pelayanan untuk melayani masyarakat umum, akan tetapi berbalik dengan pelayanan negara yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan orang banyak.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah; dan *good governance*.

Administrasi publik atau yang dikenal sebagai administrasi negara pada dasarnya sebuah kerjasama administratif yang dikerjakan lebih dari dua orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan dari administrasi publik adalah pelayanan publik karena dalam administrasi publik bertugas untuk memberikan pelayanan publik sebaik mungkin kepada masyarakat dan organisasi dalam

administrasi.

Administrasi publik memiliki beberapa kajian ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial dan Manajemen. Salah satu tugas dari administrasi publik adalah membuat suatu kebijakan atau *Policy Maker* yang dikenal dengan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Berikut beberapa definisi administrasi menurut para ahli.

Definisi menurut **Chandler & Plano** yang dikutip oleh **Pasolong** dalam **“Teori Administrasi Publik” (2017:8)** bahwa administrasi publik adalah “Proses dimana sumber daya dan personal public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelolah (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik“

Proses sumber daya dan personel merupakan penggerak dan dorongan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi dalam mengatasi suatu permasalahan kebijakan publik, administrasi publik sebagai landasan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan permasalahan yang terjadi secara terkelola oleh stakeholder atau pihak yang terkait dalam kebijakan untuk memilih langkah selanjut yang akan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik.

Menurut **Fesler (1980)** dikutip dalam bukunya yang menerjemahkan Arti dari administrasi publik sebagai berikut : Administrasi publik adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan publik.

Dalam hal ini, pemegang kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau yang disebut *stakeholder* memiliki kewenangan atau tanggung jawab yang besar dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang sudah direncanakan dan dibuat guna dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan publik.

Selanjutnya menurut **Maksudi** dalam “**Dasar-dasar Administrasi publik**” (2017:226) mendefinisikan “Administrasi Publik adalah suatu keseluruhan proses kerja sama secara rasional yang dilakukan aparatur negara dimana sumber daya dan personal publik di organisir dan dikoordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan terkait tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik”.

Menurut **Siagian** yang dikutip **Syafri** dalam judul “**Studi Tentang Administrasi**” (2015:9) yaitu mendefinisikan administrasi sebagai berikut : “Administrasi publik merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

Selanjutnya Menurut **Woodrow Wilson** yang menerjemahkan administrasi publik sebagai berikut : “Administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, dll, dalam tindakan”. Selain itu lanjutan dari teori ini berkaitan dengan pakar ahli Marx yang mana mendefinisikan administrasi sebagai : Administrasi ditentukan tindakan yang diambil dalam mengejar tujuan yang disadari. Ini adalah penataan urusan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang diperhitungkan yang bertujuan

untuk mewujudkannya yang diinginkan seseorang. Kedua, ini mencakup ketiga cabang mesin pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa karena administrasi publik memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan maka itu adalah bagian dari proses politik juga (misalnya RUU dan UU).

Menurut **Negro** yang dikutip dalam buku yang berjudul **Etika Administrasi Publik (2018)** mendefinisikan bahwa : “Administrasi publik berbeda dari administrasi swasta dalam banyak hal dan berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Juga, pada sifat administrasi publik ada dua pandangan populer, satu pandangan Integral dan yang lainnya adalah pandangan Manajerial”

Pandangan Integral mencakup semua dan terdiri dari jumlah total semua kegiatan manajerial, administrasi, teknis dan manual dan karyawan dari semua tingkatan. Pandangan ini didukung oleh LD White dan Dimock. Ini mungkin berbeda dari satu lembaga ke lembaga lainnya tergantung pada bidang pekerjaan mereka. Di sisi lain menurut pandangan manajerial, seperti namanya, administrasi publik hanya melibatkan kegiatan manajerial. Pandangan ini didukung oleh Simon, Smithburg, Thompson dan Luther Gulick. Kata administrasi itu sendiri sangat kontekstual, dan dapat bervariasi dalam arti dan definisi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Yang mana antara keduanya memiliki keterkaitan yang erat, serta adanya hubungan yang memiliki kekuatan dan juga ketersinambungan secara perspektif administrasi yang berarti perputaran atau siklus dalam pelaksanaan atau pengimplementasiannya.

Dari beberapa pengertian Administrasi Publik menurut para ahli diatas menjelaskan bahwa suatu administrasi publik baik dalam ruang lingkup manajemen terhadap organisasi ataupun instansi yang berakitan dengan pemerintahan aparaturnya di suatu wilayah maupun negara yang dilakukan dengan terdiri dari dua orang atau lebih dan memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari beberapa orang untuk tujuan yang akan dicapai, serta harus dijalankan dengan kerja sama dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pemerintah. Dan juga Administrasi publik memiliki strategi dalam menjalankan kekuasaan negara secara efektif dan efisien untuk bisa berjalan dengan lancar maka harus adanya kerjasama yang baik.

Melihat dari konteks dan *setting* sebuah organisasi, dapat dijelaskan secara kasar bahwa Pimpinan puncak atau Dewan memutuskan visi, misi, tujuan jangka pendek dan panjang, dan kepala unit bisnis kemudian membuat rencana tindakan dan membuat atau mereformasi proses, membagikan tanggung jawab, mengarahkan perencanaan, mengajak orang-orang untuk bergabung dan mulai bekerja untuk mencapai yang telah ditetapkan. Tujuan sesuai pedoman yang ditentukan. Pengurus bisa jadi Pimpinan Pemerintah dan Unit Bisnis beserta timnya bisa menjadi administrator publik yang menjadi pelaksana dan sebenarnya orang yang menjalankan pertunjukan. Dengan meliputi beberapa pihak yang terlibat atau terkait, apra pejabat atau pemegang kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam suatu organisasi yang sedang dijalankan mampu mendorong terobosan yang cukup signifikan, dengan adanya hal tersebut, tentu semua permasalahan yang muncul dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.

Administrasi Negara merupakan aspek terpenting dari birokrasi di seluruh dunia, baik itu negara demokratis, sosialis atau kapitalis, terlebih lagi dalam negara sosialis, karena semua aspek kehidupan warga dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah. Ada perubahan besar dalam cara administrasi publik diimplementasikan di zaman kuno dan abad pertengahan ketika inisiatif tidak lebih dari fungsi administratif sporadis seperti menjaga hukum dan ketertiban dan mengumpulkan pendapatan dengan sedikit atau tanpa aktivitas kesejahteraan. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini dipilih oleh raja-raja dan tidak lebih baik dari pelayan pribadi mereka. Seiring perkembangan zaman, tujuan administrasi Negara juga berubah dan di abad kesembilan belas; pendekatan terorganisir untuk layanan sipil dan administrasi publik diadopsi.

Pendekatan ini didasarkan pada kerangka hukum yang lengkap menggantikan fungsi patriarki dan turun-temurun dengan birokrasi. Munculnya pendekatan baru untuk administrasi publik terjadi karena sejumlah alasan. Yang terpenting adalah revolusi industri. Dengan Revolusi Industri, Pemerintah memasuki perdagangan dan perdagangan; yang diikuti oleh imperialisme, nasionalisme dan internasionalisme yang menambah pelebaran tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Zaman sekarang ini sekali lagi jauh berbeda dengan yang ada se-abad yang lalu dan sekali lagi ruang lingkup administrasi publik juga telah mengalami pergeseran, pastinya sulit untuk memutuskan apakah itu paradigma atau bukan. Namun demikian, meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat terutama di negara berkembang, misalnya *The Right to Information Act* atau RTI yang bertindak di India. Serta memperoleh pengetahuan tentang hak,

hak istimewa dan hukum di antara orang-orang di negara maju yang mana telah menimbulkan tantangan baru bagi para administrator publik dan pembuat kebijakan.

Permintaan untuk layanan nasional yang bersatu, konflik kepentingan antara berbagai bagian ekonomi masyarakat dan dengan migrasi global dan kemudian globalisasi; perlindungan kepentingan kelompok multi-etnis masyarakat telah membuat administrator publik sibuk. Administrasi sangat penting karena tidak cukup untuk membuat kebijakan dan undang-undang di atas kertas. Penafsiran dan penerjemahan kebijakan dan undang-undang tersebut menjadi tindakan dan pelaksanaannya adalah bagian yang sulit. Oleh karena itu, penyelenggara publik harus memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sebagai mesin. Birokrasi sering diejek dan diejek tetapi jika pekerjaan administratif dihentikan, tidak ada yang benar-benar terjadi.

Di hampir semua negara, jumlah orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan administrasi negara sangat mengerikan seperti di Amerika Serikat, angkanya kira-kira mencapai 2036.000 warga sipil tidak termasuk pegawai Kongres dan pengadilan Federal, di Inggris angkanya mencapai beberapa ribu dan di India ujian pegawai negeri. Berbagai peran penting yang dimainkan administrasi negara, yang paling penting adalah melaksanakan hukum dan kebijakan serta bertindak sebagai adjudicatornya. Oleh karena itu penting bahwa pembaca mendekati studi administrasi negara dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka untuk menghargai sifat, peran, pentingnya dan relevansi birokrasi secara penuh dan utuh (holistik).

2.1.4. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan suatu cabang yang memiliki dasar keilmuan terhadap administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem teknis penganggaran, manajemen sumberdaya hingga pada tahap evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Manajemen publik memiliki bagian daripada adanya cabang ilmu administrasi publik yang mengkaji tentang restrukturisasi pada organisasi sosial, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program. Sehingga dalam hal ini adanya manajemen publik sering keliru, dan diyakini sama dengan administrasi publik. Meskipun ada beberapa tumpang tindih, kedua disiplin tersebut sebenarnya menggunakan rangkaian tugas profesional yang berbeda.

Manajemen berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur, pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Secara etimologis istilah manajemen publik dapat dipetakan menjadi dua istilah yaitu manajemen dan publik. Selain itu manajemen juga menjadi sebuah hal yang dilakukan dalam organisasi karena memiliki suatu rencana yang berkaitan dengan tujuan. Manajemen publik sejatinya dipergunakan oleh pemerintah dan sektor nirlaba. Keadaan ini tentunya dapat menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen sektor swasta untuk mengelola penyediaan layanan kepada publik. Meskipun barangkali peristilahan ini terdengar seperti pernyataan yang berani dan berlebihan, tapi banyak dari apa yang kita lihat sebagai peradaban bergantung pada layanan publik. Namun yang pastinya,

pelayanan publik disebut juga pelayanan sipil adalah semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah.

Dalam ruang lingkup manajemen publik, manajer publik dapat beroperasi di dua bidang yang berbeda, yaitu manajemen internal dan eksternal organisasi publik. Dalam Internal merupakan manajer publik harus memahami bagaimana mengelola risiko dan perubahan dalam organisasi masing-masing. Hal ini menuntut agar mereka tetap mengetahui kondisi masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mereka untuk berfungsi secara optimal. Dengan mengakui risiko tersebut, manajer dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan mempersiapkan staf mereka untuk beradaptasi dengan ketidakstabilan kondisi buruk yang mungkin terjadi pada organisasi.

Lalu dalam ruang lingkup eksternalnya, Manajemen publik setidaknya memerlukan upaya terkemuka untuk berkolaborasi dengan kelompok swasta untuk mendukung adopsi kebijakan publik. Dalam kapasitas ini, manajer publik bekerja dengan warga negara dan organisasi publik lainnya untuk menjaga agar program publik berjalan dengan lancar. Untuk melakukan tersebut, manajer melakukan tugas-tugas seperti mengoordinasikan sumber daya manusia publik untuk membantu proyek tertentu atau membantu komunitas tertentu mengamankan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan program publik.

maka dari itu sebagaimana pengertian manajemen publik menurut para ahli yang dikemukakan sebagai berikut :

Menurut **Stoner (1982:4)** dalam buku “**Manajemen Publik**” (2012) mendefinisikan sebagai berikut “Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Manajemen merupakan suatu proses yang komprehensif tentang bagaimana mengelola suatu organisasi, baik terkait dengan penentuan desain perencanaan, pengorganisasian, pengendalian maupun terkait dengan penggunaan sumber daya organisasi lainnya.

Lalu ada kutipan dari sebuah buku Menurut **R.Terry** dalam buku yang berjudul “**Manajemen Strategi**” (2018) dengan arti manajemen publik yang didefinisikan sebagai berikut “Manajemen terdiri dari Tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Manajemen publik tidak termasuk administrasi, tetapi juga melibatkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan efisiensi maksimum, serta tanggung jawab asli untuk hasil. Dalam hal tersebut manajemen publik tidak termasuk di dalamnya administrasi, namun menggunakan atau melibatkan organisasi sebagai actor atau badan dalam pengaturan sehingga dalam pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan bisa dengan maksimal dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Penekanan dalam pengertian ini bahwa manajemen publik murni sebuah pengaturan dan bukan sebagai system administrasi, namun dalam pelaksanaannya menggunakan organisasi sebagai bentuk keteraturan.

Selain itu pendapat Menurut **Handayani** (1980 : 19) mendefinisikan manajemen sebagai berikut “Pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensi mencapai tujuan”. Dalam suatu manajemen yang baik terhadap pelayanan publik ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi tentunya perlu didukung dengan sumber daya yang memadai dalam rangka mencapai tujuan dengan memberikan kontribusi serta partisipasi yang terbaik untuk masyarakat yang memiliki persoalan dan permasalahan yang berakar baik dalam ruang lingkup wilayah pada suatu daerah yang memerlukan solusi dalam mengatasi persoalan yang terjadi.

Melanjutkan definisi Menurut **Hasibuan** dalam “**Manajemen Sumber Daya Manusia**” (2017:1) yang mengartikan manajemen publik sebagai berikut: “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **Yeremias T. Keban** (2014) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen strategik keorganisasian publik* menerjemahkan manajemen publik sebagai berikut : “Manajemen publik adalah bagian daripada adanya serangkaian bentuk upaya untuk menunjuk pada manajemen instansi pemerintah”

Dari beberapa definisi menurut para ahli ada perbedaan sudut pandang dari setiap pengertian manajemen, akan tetapi semua mengarah ke tujuan agar mencapai suatu tujuan yang sama, bisa disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Secara mendasar dapat diartikan juga bahwa manajemen publik merupakan penelitian

interdisipliner aspek generik organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya dengan baguaya kinerja atau pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya yang bukanlah murni untuk sekedar mencapai profit organisasi melainkan melayani konsumen yang berupa masyarakat sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Media ataupun actor penentu yang memiliki peran dalam setiap permasalahan social dan hal tersebut dilakukan dengan bentuk wacana atau debat dan melakukan perbaikan serta melaksanakan setiap amanah rakyat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat. Peran seperti ini sangat terlihat pada pemerintah dan setiap aktor pembuat kebijakan dan pengatur setiap masalah dan pengaturan sosial.

2.1.4.1. Unsur – Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen terdiri dari man, money, materials, methods, machines, dan market. Man atau manusia berfungsi untuk menggerakkan, memahami, hingga memotivasi karyawan. Karena itu dalam manajemen, manusia juga berperan untuk menyusun rencana serta melaksanakannya untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Mariane (2018:22)** dalam bukunya “Azaz – Azaz Manajemen” mengemukakan bahwa terdapat unsur – unsur manajemen (*tools of management*) unsur – unsur manajemen itu sendiri terdiri dari *men* , *money* , *methods* , *materials*, *machines and market* disingkat dengan 6M dan penjelasannya sebagai berikut :

1. *Men* yaitu tenaga kerja manusia baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana.
2. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Methods* yaitu cara – cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. *Materials* yaitu bahan – bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
5. *Machines* yaitu mesin – mesin atau alat – alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan.

Keenam unsur di atas memiliki perannya masing-masing yang saling mendorong tercapainya tujuan organisasi lewat manajemen. Unsur manajemen tentunya diperlukan untuk membentuk sistem manajerial yang baik pada setiap perusahaan. Jika satu saja di antara unsur manajemen tidak sempurna, maka akan berdampak pada berkurangnya upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Karena secara etimologis pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Selain itu, pengertian manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan pada implementasi kebijakan yang dibuat dan direncanakan oleh lembaga atau para pemangku kepentingan dari

kebijakan yang dilakukan. Unsur manajemen terdiri dari semua hal yang terlibat dalam prosesnya. Sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen disebut dengan manajer.

2.1.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau aktivitas yang dapat terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input agar dapat menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat dalam publik untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi, dengan melalui suatu program yang dibuat dan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan serta memiliki dampak yang saling menguntungkan satu sama lain, karena pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan yang dilaksanakan.

Implementasi kebijakan dalam arti luas merupakan alat administrasi publik, yang dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik dan sumber daya diorganisasikan secara bersama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta, baik individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut **Van Meter dan Van Horn** mendefinisikan bahwa :
“Implementasi kebijakan publik, adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu.

Pendapat menurut **Mulyadi (2015:26)** yang menyatakan bahwa :
“Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Pengertian tersebut bahwa suatu kebijakan mampu merubah atau mentransformasikan suatu hal di dalam publik dengan dilakukannya implementasi kebijakan oleh multiorganisasi (pemangku kebijakan) dengan menerapkan hasil keputusan dari kebijakan yang dibuat kemudian diimplementasikan melalui strategi-strategi yang dibuat terhadap berbagai permasalahan yang ada pada masyarakat.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut terdiri atas beberapa tahapan aspek yang meliputi :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Adapun pendapat Implementasi kebijakan berperspektif top-down yang dikembangkan oleh **George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016:136)** Yang menamakan “Model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III tersebut, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Masalah utama dari implementasi kebijakan terhadap administrasi publik ialah : *Lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation to decission of policemakers will*

not be carried out seccessfully. Pada teori Edward ini cenderung menyarankan untuk lebih memperhatikan isu pokok permasalahan yang muncul, yang mana masalah tersebut jika akan dilakukan implementasi kebijakan harus terlebih dahulu memahami isu pokoknya agar implementasi kebijakan menjadi efektif saat dilaksanakan. tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat

Selain itu **Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147)** mendefinisikan bahwa : Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan pada kebijakan yang sedang berjalan.

Kemudian pendapat menurut **Udoji dalam Mulyadi (2015:46)**, yang memaparkan implementasi kebijakan sebagai berikut : “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”. Pelaksanaan kebijakan disebut penting karena inilah yang diinginkan masyarakat, bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan, disini yang dimaksud ialah jika pelaksanaan kebijakan tanpa dibuatnya dahulu kebijakan mungkin bisa terjadi, namun jika kebijakan sudah dibuat akan tetapi tidak dilaksanakan ini sama saja tidak ada pengaruhnya terhadap persoalan yang ada pada publik, kebijakan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan hanya akan menjadi sebuah arsip yang tidak penting, yang tidak ada sama sekali implikasinya terhadap pengaruh masyarakat.

Selain itu, implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah ada secara teori adalah sebagai berikut.

Menurut **Matland (Hamdi, 2014:98)**, literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*), dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Kelompok dengan pendekatan *top-down* ini melihat pada perancang

kebijakan yang merupakan sebagai peran aktor sentral dalam suatu implementasi kebijakan. Kelompok *top-down* juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok *bottom-up* menekankan pada dua hal, yaitu kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok *bottom-up* berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigius dan konflik dari implementasi kebijakan.

Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan yang akan dilaksanakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri, terlepas dari itu beberapa permasalahan yang terjadi merupakan persoalan yang harus diselesaikan dan diatasi dengan berbagai solusi-solusi yang mampu membereskan masalah yang muncul, adanya kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan

merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan dan persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Selain itu juga implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.1.6. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal yang tentunya harus membawa ke arah lebih baik dan bersifat menguntungkan satu sama lain. Karena Implementasi adalah suatu hal yang sifatnya krusial dalam mewujudkan suatu gagasan atau konsep yang muncul pada seseorang atau kelompok untuk merealisasikannya melalui kegiatan atau program sebagai wujud dari implementasi. Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada strategi itu sendiri. Implementasi adalah proses yang diterapkan di banyak bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lagi. Selain itu juga melanjutkan pembahasan diatas bahwa implementasi ialah suatu penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apa pun. Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi

Seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Karena Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang, tanpa batasan apapun. Implementasi pada umumnya ialah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Selain itu Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.

Implementasi menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan terhadap suatu sistem. Adapun juga tujuan dari implementasi itu sendiri dengan meliputi penciptaan rancangan tetap dengan menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan terhadap suatu sistem. Proses ini diperlukan agar sistem yang dilakukan dapat bekerja dengan tepat. Lalu membuat uji coba terhadap peraturan yang nanti akan diterapkan. Uji coba ini berguna agar dapat melihat kesesuaian sistem yang berjalan tersebut. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat ini mampu mewedahi kebutuhan-kebutuhan yang dapat disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan juga mewujudkan sebuah rencana atau rancangan yang sudah disusun

sedemikian rupa agar mampu berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat..

Seperti makna implementasi menurut **Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979)** sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari hasil kebijakan itu sendiri.

Adapun yang dikemukakan oleh **Gordon** dalam **Mulyadi, (2015:24)** yang menyatakan bahwa : “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. Tindakan implementasi dapat dilakukan dari basis kebijakan atau program yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan merealisasikan program yang dibuat, tentu harus menimbulkan dampak atas program yang diimplementasikannya. Terlepas dari kepentingan politik di dalamnya, implementasi harus diupayakan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan target yang dituju dalam mencapai kesejahteraan bersama, jika melihat dari perspektif politik, bahwa definisi implementasi dalam ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Lalu Menurut **Grindle** dalam **Mulyadi (2015:47)** yang menyatakan bahwa: “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Dalam perumusan kebijakan atau program tentu didalamnya terdapat kegiatan yang bersifat administratif, tindakan dalam melakukan proses administratif ini pun perlu dilakukan terhadap program yang akan direalisasikan, dengan ditelitinya program yang dibuat menjadi sebuah parameter apakah program yang akan direalisasikan akan efektif atau tidaknya,

tingkatan program yang dibuat tergantung dengan tingkat permasalahan yang ada. Sehingga dengan adanya proses administratif ini merupakan hal yang umum, dan juga sebagai salah satu bentuk implementasi yang menjadi tolak ukur dalam merealisasikan program yang dibuat. Karena sebuah kebijakan atau program yang akan direalisasikan perlu diteliti secara menyeluruh, mulai dari dampak yang akan dirasakan, tahap yang harus dilakukan hingga dalam penerapan program atau kebijakannya tersebut yang tentu didalamnya terdapat proses-proses yang harus dilalui.

Selain itu pendapat menurut **Widodo** dalam **Sutojo (2015:4)** berkenaan dengan pengertian diatas yang mengatakan bahwa : “Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”. Pelaksanaan tindakan implementasi tentu perlu melibatkan sumber-sumber daya salah satunya sumber daya manusia sebagai penggerak dalam melakukan proses-proses yang berkaitan dengan implementasi dari kebijakan atau program. Tidak hanya itu saja, sumber lainnya pun seperti dana atau kemampuan operasional merupakan bentuk penunjang dalam keberhasilan suatu kebijakan atau program yang akan diimplementasikan, adanya dana dan kemampuan operasional menjadi sebuah motivasi didalam sumber daya yang mencakup banyak aspek diantaranya sumber daya manusia yang sudah pasti memerlukan dana sebagai alat untuk membeli keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam program kebijakan yang sudah dirumuskan dan

diformulasikan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak swasta ataupun pihak yang terkait dengan program kebijakan yang akan dilakukan.

Menurut **Sudarsono (2012)** dalam bukunya yang berjudul **Analisis kebijakan publik** mengemukakan bahwa : “Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan”. Aktivitas yang dilaksanakan berarti berkaitan dengan solusi atau penyelesaian suatu persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dengan melalui kebijakan atau program yang dibuatnya, implementasi mampu dilakukan dengan dibantu oleh sumber daya yang memadai sebagai alat pendukung dalam penyelesaian dari persoalan yang terjadi, sebagai solusi dalam mengatasi masalah di suatu daerah atau wilayah yang dilakukan oleh dinas dan pihak terkait, implementasi memerlukan sumber daya berupa sarana dan prasarana, sehingga sebagai wujud atau bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dibuat mampu membuahkan hasil dan memberikan dampak yang baik dan menguntungkan bagi target atau sasaran yang menerima dengan baik terhadap implementasi kebijakan yang dilakukannya tersebut.

Dapat disimpulkan dari kajian beberapa teori diatas terkait implementasi bahwa implementasi pada suatu kebijakan yang dilakukan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Artinya implementasi sebagai suatu hal yang mampu menentukan keberhasilan dalam suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan (*outcome*) terhadap persoalan yang muncul, sehingga implementasi sebagai awal

dalam melaksanakan kebijakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah menantikannya. Pada akhirnya proses pelaksanaan implementasi menjadi menitikberatkan pada sistem atau mekanisme perencanaan.

Selain itu, kesimpulan lainnya dari kutipan teori terkait pembahasan implementasi diatas ialah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Di samping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari rencana-rencana yang sedang dijalankan.

2.1.7. Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan suatu tindakan dan keputusan yang dapat dipergunakan dalam memformulasikan dan juga mengimplementasikan suatu strategi yang memiliki daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Dengan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja

perusahaan dalam jangka panjang, Manajemen Strategi sendiri meliputi pengamatan lingkungan, Perumusan Strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), Implementasi Strategi dan Evaluasi serta pengendalian. Dan juga Manajemen Strategi sendiri lebih memfokuskan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Selain itu pengertian Manajemen Strategi juga merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses keputusan yang merupakan fokus pada tujuan yang akan dituju. Kalau diartikan secara bebas Manajemen Strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu Strategi atau sejumlah Strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Rencana Manajemen Strategi untuk perusahaan ialah suatu rencana jangka panjang yang didasarkan pada analisis dan diagnosis lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya memformulasikan hasil analisis tersebut menjadi sebuah keputusan strategi yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir.

Proses dalam mengambil keputusan dengan menerapkan tindakan tentu hal tersebut akan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses ini dilakukan secara kontinyu dengan cara mengevaluasi dan juga mengontrol internal bisnis, melakukan analisis kompetitor, serta menetapkan strategi untuk bisa bersaing dengan baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengevaluasi kembali strategi secara lebih teratur agar bisa menentukan tindakan yang nantinya akan dilakukan serta

memantau perkembangannya atau diganti dengan menggunakan strategi lain. Strategi tersebut harus bisa diterapkan oleh seluruh pihak perusahaan agar bisa menghadapi persaingan dan menampilkan keunggulan perusahaan.

Konsep perspektif nantinya akan digunakan saat masalah belum muncul atau sebagai suatu perencanaan yang memang harus dikembangkan. Sedangkan konsep deskriptif akan diterapkan agar bisa menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan/dinas. Saat perusahaan/dinas sudah mengetahui dan memahami visinya, maka sumber daya yang tepat bisa ditempatkan pada bagian yang tepat agar bisa mencapai tujuan dari rencana perusahaan. Adanya keputusan dan komitmen pada perencanaan strategis mampu memperkuat posisi perusahaan di dalam persaingan pasar dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya hal tersebut akan memberikan keuntungan finansial. Perusahaan yang terus menilai performa dengan menggunakan blueprint perusahaan akan memperoleh respon dan bisa beradaptasi secara cepat dengan kekuatan pasar.

Manajemen strategi akan membantu perusahaan/dinas dapat menjadi lebih proaktif dan jadi tidak reaktif dalam menentukan perkembangan perusahaan/dinas di masa yang akan datang pada saat melaksanakannya. Berkenaan dengan hal tersebut berikut pemaparan manajemen strategi Menurut **Pearce II & Robinson (2008)** dalam buku **“Manajemen Strategis” Eddy Yunus (2016)** menjelaskan Manajemen Strategi sebagai berikut “Manajemen Strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana – rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi”.

Menurut **Schuler (2010)** dalam buku “**Manajemen Strategis**” **Eddy Yunus (2016)** mengemukakan bahwa Manajemen Strategi “Titik temu yang dirumuskan suatu organisasi antara sumber daya dan keahlian internalnya dan kesempatan serta resiko yang terbentuk melalui lingkungan eksternalnya”. Dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, tentu tidak akan luput dari yang namanya sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun manusia. Yang jelas sumber daya tersebut dalam mendorong pemenuhan kebutuhan target atau sasaran pasti meliputi sarana dan prasarana sebagai bentuk wujud dalam memberikan pelayanan yang terbaik dari pemerintah untuk publik maupun masyarakat

Selanjutnya definisi Manajemen Strategi menurut **Fred R. David (2010:5)** dalam buku “**Manajemen Strategik**” **Fred R. David (2017)** mendefinisikan sebagai berikut “Manajemen Strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan – keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya”. Sebagai jembatan dalam pelaksanaan kebijakan maupun program yang dibuat oleh organisasi menjadi salah satu tolak ukur manajemen strategi dalam upaya mengatur, mengelola, mengendalikan beberapa sumber daya maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan materi maupun teori. Selain itu adapun evaluasi dari keputusan-keputusan yang menjadi sebuah keharusan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan program maupun kegiatan berupa kebijakan yang nantinya akan menjadi dampak baik atau buruknya tergantung pengambilan keputusan dan pelaksanaannya di lapangan.

Lalu menurut **Hubeis dan Najib (2014:9)** dalam buku “**Manajemen Strategik**” **Fred R. David (2017)** menjelaskan bahwa :“Manajemen Strategis sebagai seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen Strategis didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari rumusan dan implementasi padarencana yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan serta bagaimana mengevaluasi dan melaksanakan tindakan tersebut demi tercapainya tujuan organisasi yang mencakup perumusan implementasi dan evaluasi rencana strategi”.

Dan yang terakhir menurut **Sondang P. Siagian** dalam bukunya “**Manajemen Strategik**” (2020) mendefinisikan Manajemen Strategik adalah “Serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan tersebut”. Secara rasional, bahwa kegiatan atau program atau juga kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dirangkai menjadi suatu rangkaian hingga menjadi serangkaian satu kesatuan yang membulat dan tidak dapat dipisahkan, satu kesatuan dari sistem atau rangkaian yang sudah bulat tersebut kemudian diimplementasikan dengan manajemen strategis yang digabungkan, sehingga implementasi kebijakan yang dilakukan berjalan dengan teratur, terkelola, dan terkendali.

Dari berbagai pengertian atau definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Strategi adalah suatu ilmu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*)

keputusan – keputusan strategis antar fungsi – fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan – tujuan masa yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Strategik adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengimplementasian, serta pengawasan dan pelaksanaan implementasi kebijakan baik di instansi pemerintah maupun swasta demi terwujudnya kebijakan yang optimal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Proses manajemen strategis tersebut berpedoman pada pemahaman yang mendalam dari serangkaian yang utuh dengan meliputi beberapa tahap sebagai pendukungnya, beberapa tahap tersebut meliputi tahap formulasi dengan Membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Lalu tahap implementasi dalam menentukannya sasaran tujuan, dengan mengelola kebijakan dan semua sumber daya. Membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi hingga tahap evaluasi.

2.1.8. Program Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur

Program Bantuan Sosial ini di buat untuk mengatasi suatu permasalahan penurunan ekonomi yang di alami masyarakat akibat *Covid-19* sehingga Dinas Sosial dan Kabupaten Belitung Timur membuat Program penyaluran Bantuan Sosial dalam pemulihan ekonomi pada saat pandemi. Program Bantuan Sosial sebagai berikut:

1. Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan yang di berikan berupa uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Tahun 2022 menyerahkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp.388.800.000 yang di bagikan kepada 108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masing” KK akan menerima dana Rp.300.000 per bulan selamawaktu 1 tahun. Jumlah BLT DD dari sebelumnya 35% Dana Desa meningkat menjadi 40%.

2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK baik formal maupun keluarga miskin yang menrima Kartu Indonesia Pintar. Bantuan yang diberikan sesuai dengan tingktan Pendidikan seperti Rp.450.000/tahun untuk anak SD, Rp.750.000/tahun untuk SMP, danRp.1juta/tahun untuk SMA/SMK. Selain itu bisa dilihat dari adanya KIP sangat membatu Pendidikan bagi siswa yang kurang mampu serta dapat membantu orang tuamurid untuk membeli peralatan sekolah

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program bantuan pangan non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan telur melalui e-warong. BPNT dapat diharapkan mengurangi beban dalam pemenuhan kebutuhan pangan, serta memberikanbahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga lebih banyak pilihan PKM dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menyalurkan bantuan sosial berupa 10kg untuk 6.901 keluarga penerima manfaat di kabupaten Belitung timur.

2.2. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan teori – teori yang digunakan oleh peneliti sesuai landasan dalam suatu pola pemikiran untuk memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan masalah – masalah yang telah dikemukakan maka peneliti akan kemukakan teori – teori dari para ahli yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kerangka pemikiran. Menurut penulis kerangka berfikir ini sangat berhubungan dengan permasalahan yang ada yang dimana permasalahan tersebut ialah bagaimana program Implementasi Strategi penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur. Maka berdasarkan definisi diatas selanjutnya peneliti menetapkan parameter Implementasi Strategi menurut teori **George C. Edward** mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Strategi yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan membuat agar implementor mengetahui apa yang harus ditransmisikan kepada sasaran atautarget sehingga mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi merupakan tolak ukur sejauh mana kebijakan dalam suatu peraturan yang telah disampaikan secara jelas interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan dengan memperhatikan dimensi komunikasi yaitu :

- Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementation*), namun juga disampaikan kepada para kelompok sasaran atau pihak lain yang juga ikut terlibat dan berkepentingan, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan adanya dimensi transmisi ini merupakan bentuk transparansi terhadap para pihak secara terbuka bahwa pelaksanaan maupun pengimplementasiannya dapat dilaporkan atau diinformasikan agar adanya sinergitas antara pihak yang terlibat, serta komunikasi dua arah yang mampu saling memberikan gagasan maupun masukan.

- Konsistensi

Perlunya suatu dimensi konsistensi agar suatu kebijakan yang dibuat atau diambil mampu dilaksanakan dengan baik, dan tidak simpang siur, sehingga kebijakan yang sedang berlangsung dilaksanakan tidak terjadi kebingungan pada saat pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan yang dilakukannya. Target grup dan pihak-pihak yang terlibat mampu memberikan kontribusi serta partisipasi yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan tersebut secara optimal dan maksimal.

- Kejelasan.

Kejelasan atau (*clarity*) menghendaki agar suatu kebijakan yang sudah ada memiliki kepastian dan arah yang jelas, kebijakan yang sudah ditransmisikan oleh *stakeholder* terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait pada kebijakan ini mampu mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan jika saat pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan dapat sukses atau dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien

2. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan berkaitan dengan sumber daya baik itu sumber daya mati maupun benda hidup, bisa dari sumber daya manusia maupun sumber daya yang

dibutuhkan masyarakat. Apabila dalam implementor kekurangan sumber daya maka pelaksanaan tidak akan berjalan dengan efektif, maka dari itu terdapat beberapa dimensi yaitu :

- Kecukupan dan kualifikasi

Kecukupan dan kualifikasi sebagai wujud suatu pelaksana kebijakan yang memiliki kapasitas atau kinerja yang sesuai dengan porsinya, kualifikasi ialah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus dalam menyelesaikan persoalan yang muncul, sehingga pelaksanaan kebijakan yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang ingin dituju.

- Kewenangan

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Maka Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para semua pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat juga menggagalkan proses implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas sebuah kewenangan. Di salah satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- Informasi

Dalam implementasi kebijakan, Informasi mempunyai dua hal bentuk yaitu: Pertama, informasi yang dapat berhubungan dengan cara melaksanakan sebuah kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- Sarana dan prasarana

Sarana & prasarana menjadi hal yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan adanya persoalan implementasi kebijakan, tetapi di perlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam implementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri

3. Disposisi

Watak atau karakteristik yang dimiliki implementor, jika implementor diposisi yang baik maka implementasi dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan pembuat kebijakan begitu pun sebaliknya, untuk mencapai suatu tujuan implementor harus memiliki watak karakteristik sebagai berikut :

- Komitmen

Komitmen menjadi hal yang sakral dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

yang telah dibuat, perlunya suatu komitmen sebagai salah satu bentuk kesepakatan antara pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sehingga komitmen perlu dilakukan secara tegas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan

- Kejujuran

Kejujuran menjadi modal utama dalam melakukan implementasi kebijakan terhadap persoalan atau permasalahan yang muncul, karena kebijakan dibuat atas dasar persoalan yang ada di kehidupan masyarakat, masyarakat tidak hanya butuh pemberian solusi yang dilakukan, akan tetapi perlu juga segi transparansi dan keterlibatan secara terbuka pada saat pelaksanaan kebijakan yang dibuat, sehingga dapat menimbulkan rasa keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun implemantator (pelaksana).

- Sifat demokratis

Adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama atas hak dan kewajiban seseorang dan orang lain. Contoh sikap demokratis adalah menghargai perbedaan dan menghargai keputusan. Demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Maka dari itu perlunya sifat tersebut sebagai cerminan diri dalam melakukan suatu hal yang sifatnya menyangkut banyak hajat kehidupan orang, pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan perlu membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, sehingga adanya sifat demokratis dapat membuat pengimplementasian berjalan sesuai rencana yang matang dan mampu merubah ke arah yang lebih baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek dari struktur organisasi sebagai berikut :

- Standar operating procedure (SOP)

Standard operational procedure (SOP) merupakan sebuah prosedur kerja ukuran dasarnya. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk sebuah keseragaman dalam bekerjanya organisasi - organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Winarno, 2014:206). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat juga memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga bisa dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi-organisasi yang sangat kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam melakukan penerapan peraturan-peraturan.

- Fragmentasi struktur organisasi

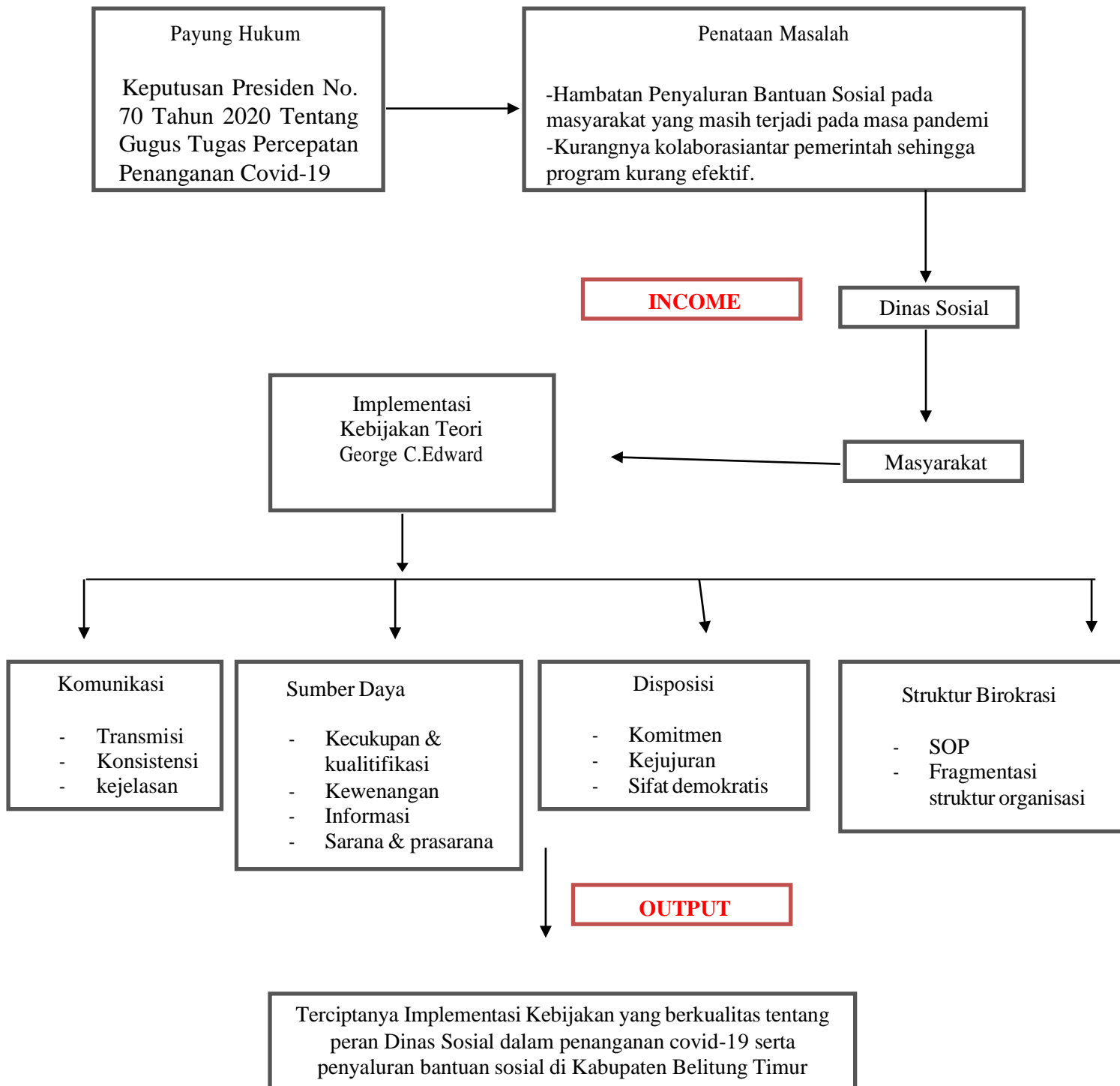
Fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin

berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi dapat mengakibatkan macam pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari pemaparan diatas hasil yang dicapai menciptakan implementasi kebijakan atau program yang berkualitas dan mampu merubah ke arah lebih baik, karena perlunya suatu konsep atau dimensi pada suatu implementasi kebijakan yang sudah dibuat untuk kemudian dilaksanakan sebagai pendorong atau memudahkan para pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga apa yang dijalankan mampu menjadi *goals* yang dapat mencapai tujuannya. Selain itu kabupaten Belitung Timur akan mudah menyelesaikan program penyaluran bantuan sosial yang problematikanya bersifat berkelanjutan atau *sustainable*, karena masyarakat memiliki kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi, ditambah pada masa pandemi ini pergerakan siklus roda kehidupan masyarakat dibatasi agar tidak timbulnya masalah baru atau penyebaran *covid-19* yang dapat merugikan banyak pihak.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat untuk mensukseskan atau menyebarkan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat, hal tersebut menjadi salah satu bentuk transparansi atas atensi masyarakat yang mampu membantu dan mewujudkan transmisi implementasi kebijakan yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat, beberapa pihak tersebut sebagai jembatan dalam menyampaikan dan memberikan apa yang seharusnya masyarakat dapatkan

sebagai haknya untuk mendapatkan bantuan sosial, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Sehingga adanya kebijakan ini atas dasar konsep atau gagasan pemerintah dan masyarakat serta beberapa pihak lainnya menjadi kunci dalam memsukkseskan implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial di masa pandemi ini.



Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan telah dilaksanakan tetapi belum efektif maka dibutuhkan Implementasi Strategi yang ditentukan oleh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

2.3. Proposisi

Berdasarkan uraian kerangka berfikir diatas, berikut ini proposisi mengenai pengelolaan

1. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat Kabupaten Belitung Timur di masa pandemi ini akan berjalan optimal dan efektif apabila menerapkan Implementasi Kebijakan yang berkualitas dalam penanganan *covid-19* ini,
2. Serta penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi hambatan dalam implementasi strategi penyaluran bantuan sosial.

Hal tersebut dapat teratasi permasalahannya jika dalam implementasi kebijakannya menggunakan empat elemen menurut George C. Edward d, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.